

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak terkecuali wilayah Kalimantan Utara. Struktur anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Utara terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan Daerah
2. Anggaran Belanja Daerah
3. Pembiayaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Hasil pajak Daerah.
2. Hasil retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
5. Dana Perimbangan, yaitu : Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
6. Dana Alokasi Umum (DAU).
7. Dana Alokasi Khusus (DAK).
8. Pinjaman Daerah.

9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Diharapkan pemerintah Kalimantan Utara dapat mengelola sumber-sumber penerimaan tersebut dengan baik dan diharapkan nantinya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya meningkatkan sumber pendapatan yang nantinya berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di daerah yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan Kalimantan Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 105.564.938.000.000,-. Pada tahun 2020 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Utara sebesar Rp 110.953.452.000.000,-. Pada tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Utara sebesar Rp 115.475.684.000.000 .

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Sementara itu, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan latihan dalam menjalankan pekerjaannya. (Murni dan Amaliawati : 2012, 39-41)

Dari hasil uraian atas maka permasalahan yang terjadi adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi baik di bidang swasta asing dan juga penanaman dari dalam negeri serta di dukung juga oleh membaiknya sektor-sektor perekonomian di Kalimantan Utara akan tetapi belum diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang signifikan atau keseluruhan, serta belum mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia menyeluruh sehingga masih ada tenaga kerja yang belum diberdayakan dalam bentuk pengangguran.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan tersebut, dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini berikut :

1. Bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah
 - 1.1 Masukan dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - 1.2 Menciptakan investasi yang lebih baik yang akan meningkatkan kesempatan kerja.
2. Bagi peneliti adalah
 - 2.1 Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian ini.
 - 2.1 Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengadakan penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Afrizal (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan”. Metode Penelitian menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data rentang waktu 11 tahun mulai dari 2001 hingga 2011. Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat hasil, investasi PMDN dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB disulawesi Selatan sedangkan belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.

Farchan (2003) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi PMDN dan PMA terhadap PAD Kota Medan” periode tahun penelitian 1980 sampai dengan tahun 2002. Metode perhitunga menggunakan regresi berganda. Hasil perhitungan untuk Hasil uji t menjelaskan bahwa hubungan PMDN dan PMA terhadap PAD adalah tidak signifikan. Secara uji F hubungan PMDN dan PMA adalah signifikan. Nilai R Square adalah 0,35.

Jolianis (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil pengujian pertama diketahui bahwa konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan

PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara parsial konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pembangunan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Hasil pengujian kedua diketahui bahwa investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara parsial investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Muhtar (2013) dengan judul penelitian “Analisis pengaruh produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di propinsi jawa tengah tahun 2002 – 2010” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah Tahun 2002-2010, (2) Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2010, (3) Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2010. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Evi dan Handayani pada tahun 2008 dengan judul pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap

PAD di Kabupaten Merangin menggunakan model persamaan Regresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis : (1) Uji Asumsi Klasik (2) Regresi Linear Data Panel (3) Uji Statistik. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data panel (gabungan antara data *time series* dan *cross section*) Tahun 2002-2010. Meliputi data : Realisasi PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2010, Penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah 2002-2010, dan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2002-2010. Hasil Analisis menggunakan Model Regresi Linear Data Panel dengan metode *fixed effect* menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan. Untuk pengujian secara bersamaan diperoleh hasil bahwa PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2010. Berdasarkan penelitian mengenai : (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Produk Domestik Regional Bruto, (c) Jumlah Penduduk. Peneliti melihat bahwa pertumbuhan penduduk yang di imbangi oleh peningkatan mutu pendidikan akan menaikkan PDRB dan PAD di Provinsi Jawa Tengah.

Anasmen (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. Tahun penelitian adalah tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. penelitian ini membahas hubungan antara Belanja Modal Pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian adalah

melihat pengaruh besarnya Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006). Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Investasi Swasta signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Jumlah Penduduk juga signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto .

Bagus (2009) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah. Metode Penelitian menggunakan Analisis regresi berganda dengan menggunakan data rentang waktu 15 tahun mulai tahun 1994 hingga 2008. Hasil analisa data menunjukkan bahwa model penelitian ini lolos uji asumsi klasik dengan R-square model sebesar 0,958. PAD, Tingkat Investasi, Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap PDRB Jawa tengah. Koefisien PAD sebesar 0,812. Adanya pengaruh yg positif antara Tingkat Investasi dengan PDRB Jawa Tengah berdasarkan hasil regresi dapat dilihat koefisien tingkat investasi 0,036. Adanya pengaruh yg positif

antara Tenaga Kerja dengan PDRB Jawa Tengah berdasarkan hasil regresi dapat dilihat koefisien 0,924 Tenaga Kerja.

Najiah (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap PDRB Di Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Depok. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan bantuan software Microsoft Excel 2007 dan E-views 5. Data sekunder yang digunakan adalah data time series periode tahun 2001-2010. Variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sedangkan variabel dependennya adalah PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan (DP) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Depok. Nilai R^2 0.973734. Hal ini berarti 97,3734 persen di pengaruhi oleh variabel variabel independen dan sisanya 2,6266 di pengaruhi di luar model.

Berutu (2011) dengan judul penelitian Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Per Kapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh

simultan maupun parsial Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan per Kapita Masyarakat dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis, dijustifikasi bahwa Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan per Kapita Masyarakat dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Belanja daerah, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk yang berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

KRITERIA YANG DIAMATI	PENELITIAN				
	Fitrah Afrizal	Muhammad Farchan	Jolianis	Aria Sejahtera Muhtar	Andi Arifuddin
Judul	Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan	Pengaruh Investasi PMDN dan PMA terhadap PAD Kota Medan	Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Analisis pengaruh produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di propinsi Jawa Tengah	Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi serta Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan implikasinya pada Pendapatan Asli Kalimantan Timur.
Tahun Penelitian	2013	2003	2013	2007	2014
Jenis Data	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder
Lokasi Penelitian	Sulawesi Selatan	Medan	Sumatera Barat	Jawa Tengah	Kalimantan Timur
Lamanya tahun yang diteliti	2001 s/d 2011	1980 s/d 2002	2005 s/d 2009	2002 s/d 2010	2004-2013

Tabel 2.1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang (Lanjutan)

KRITERIA YANG DIAMATI	PENELITIAN				
	Fitrah Afrizal	Muhammad Farchan	Jolianis	Aria Sejahtera Muhtar	Andi Arifuddin
Jumlah Variabel	4 variabel	3 Variabel	4 Variabel	3 variabel	5 variabel
Alat Analisis	Regresi Linear Berganda	Regresi Linear Berganda	Regresi Linear Berganda	Fixed Effect	Path analysis
Hasil Penelitian	Investasi PMDN dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB disulawesi Selatan sedangkan belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil uji t menjelaskan bahwa hubungan PMDN dan PMA terhadap PAD adalah tidak signifikan. Secara uji F hubungan PMDN dan PMA adalah signifikan. Nilai R Square adalah 0,35.	Hasil pengujian pertama diketahui bahwa konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara parsial konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pembangunan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Hasil pengujian kedua diketahui bahwa. Secara parsial investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah berpengaruh signifikan	Hasil Analisis menggunakan Model Regresi Linear Data Panel dengan metode fixed effect menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan. Untuk pengujian secara bersamaan diperoleh hasil bahwa PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi	Hasil analisis model jalur 1 dan pengaruh langsung Belanja Daerah dan Investasi serta tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Menunjukkan nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Daerah dan Investasi serta tenaga kerja secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto mempunyai Provinsi Kalimantan Timur. Belanja Daerah berpengaruh signifikan

			terhadap PAD.	Jawa Tengah Tahun 2002-2010. Berdasarkan penelitian mengenai : (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Produk Domestik Regional Bruto, (c) Jumlah Penduduk. Peneliti melihat bahwa pertumbuhan penduduk yang diimbangi oleh peningkatan mutu pendidikan akan menaikkan PDRB dan PAD di Provinsi Jawa Tengah.	terhadap Produk Domestik Regional Bruto sebesar. Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto sebesar. Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
--	--	--	---------------	---	--

Tabel 2.1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang (Lanjutan)

KRITERIA YANG DIAMATI	PENELITIAN			
	Anasmen	Bagus	Najiah	Berutu
Judul	Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah</i>	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap PDRB Di	Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Per Kapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Utara

			Kota Depok	
Jenis Data	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder
Lokasi Penelitian	Sumatra Barat	Jawa Tengah	Depok	Sumatera Utara
Tahun	2009	2009	2013	2011
Jumlah Variabel	4variabel : Belanja Modal perumbuhan ekonomi Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk	4 Variabel: <i>Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja</i> PDRB	4 variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan , Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PDRB	5 variabel : Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Per Kapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Alat Analisis	regresi berganda	regresi berganda	Ordinary Least Square (OLS)	Regresi linear berganda
Program Bantu	SPSS	SPSS	SPSS	SPSS
Hasil Penelitian	Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Investasi Swasta signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.	PAD, Tingkat Investasi, Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap PDRB Jawa tengah. Koefisien PAD sebesar 0,812.	pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan (DP) dan Tingkat partisipasi angkatan kerjan(TPAK) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB	Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan per Kapita Masyarakat dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

B. Teori Keuangan Daerah

Keuangan daerah tidak terlepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrument yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Nurlan : 2006, 34).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki / di kuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku (Nurlan : 2006, 35).

Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kewajiban daerah berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan-pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah (Nurlan : 2006, 35).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim : 2001, 23).

Supriatna (2000 : 174) menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.

1. Lingkup Keuangan Daerah

Lingkup keuangan daerah mempunyai kaitan erat dengan sistematisasi serta urutan tentang sistem administrasi keuangan daerah itu sendiri juga segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara keseluruhan. Lingkup yang dimaksud meliputi :

- a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah pusat sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam pemerintah maupun dalam bidang pembangunan.
- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam APBD tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah serta bank pembangunan daerah (BPD) yang juga berfungsi sebagai kas negara (Nurlan : 2006, 39-40).

2. Azas Keuangan Daerah

Sebagai konsekuensi Pasal 18 UUD 1945 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, kepada penyelenggaraan pemerintah negara diwajibkan melaksanakan *policy* atau kebijaksanaan

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah. Azas-azas tersebut yaitu :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka kesatuan republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dan pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya (Halim : 2001, 24-25).

3. Belanja Daerah

Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera pemerintah menjalankan berbagai macam program pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit.

Mangkoesoebroto (2003 : 56) menyatakan bahwa anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk

mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya.

Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi dibedakan menjadi dua : subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan bunga utang negara. Anggaran belanja rutin tersebut memiliki peran yang penting guna menunjang jalannya pemerintahan, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan anggaran rutin tersebut agar terjadi kesinambungan antara jumlah pengeluaran dengan hasil yang didapatkan. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesebroto, 2003 : 120).

2. Pengeluaran Pembangunan

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki sifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan

fisik dan non fisik. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana yang didapatkan oleh pemerintah. Dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah (Mangkoesoebroto, 2003: 124).

Belanja atau pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan (Mardiasmo, 2002 : 185).

Pengeluaran pembangunan ditujukan bagi peningkatan sarana dan prasarana dipelbagai sektor pembangunan. Sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002 : 186):

1. Industri
2. Pertanian dan kehutanan
3. Sumber Daya Air dan Irigasi
4. Tenaga Kerja
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha daerah, Keuangan daerah dan Koperasi
6. Transportasi
7. Pertambangan dan Energi
8. Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman
10. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
11. Pendidikan, Kebudayaan nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
12. Kependudukan dan Keluarga Berencana
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja
14. Perumahan dan Pemukiman
15. Agama
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
17. Hukum
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
20. Keamanan dan Ketertiban Hukum

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2003:35).

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan swasta (Dumairy, 2001:161).

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran pemerintah menggunakan identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ dimana Y menggambarkan pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, permintaan agregat digambarkan pada persamaan $C + I + G + (X - M)$ dimana G merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Artinya adanya penurunan ataupun kenaikan akan mengurangi ataupun meningkatkan pendapatan suatu negara. Pendapatan dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan.

1. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut :

- a) Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
- b) Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
- c) Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
- d) Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas (Suparmoko : 2000, 36-45).

Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menurut berbagai macam klasifikasi sebagai berikut :

1. Pembedaan antara Pengeluaran atau Belanja Rutin dan Pengeluaran atau Belanja Pembangunan.

- a) Belanja Rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Belanja rutin terdiri atas:
 - 1. Belanja Pegawai yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai termasuk gaji pokok dan segala macam tunjangan.
 - 2. Belanja Barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
 - 3. Belanja Pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terjaga dengan baik.
 - 4. Belanja Perjalanan, yaitu biaya perjalanan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah.
- b) Belanja Pembangunan, adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik-spiritual.

2. Perbedaan antara *Current Account* atau *Current Expenditure* dengan *Capital Expenditure* atau *Capital Account*.

1. *Current Expenditure* atau *Current Budget* (anggaran rutin), yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta belanja pemeliharaan.
2. *Capital Expenditure* atau *Capital Budget* (belanja pembangunan) yaitu rencana untuk pembelian *capital* (tetap).
3. Perbedaan *Obligatory Expenditure* dengan *Optional Expenditure*, antara *Real Expenditure* dengan *Transfer Expenditure* dan antara *Liquidated Expenditure* dengan *Cash Expenditure*.
4. *Optional Expenditure* atau Pengeluaran Opsional adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat tiba-tiba dibutuhkan.
5. *Real Expenditure* atau pengeluaran nyata adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa.
6. *Transfer Expenditure* adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa, jadi tidak ada *direct quid quo*.
7. *Liquidated Expenditure* adalah pengeluaran pemerintah yang sudah diajukan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semula dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah mendapatkan pengesahan.

8. *Cash Expenditure* adalah pengeluaran yang telah sungguh-sungguh dilaksanakan berupa pembayaran-pembayaran konkrit (Suparmoko : 2000: 36-45).

4. Pendapatan Nasional

Alat ukur yang banyak digunakan untuk mengukur secara keseluruhan kegiatan ekonomi tersebut adalah perhitungan pendapatan nasional atau produk nasional. Untuk keperluan analisis biasanya digunakan konsep Produk Domestik Bruto atau PDB, yaitu produksi barang-barang dan jasa-jasa yang belum dikoreksi dengan pendapatan bersih terhadap luar negeri dari faktor-faktor produksi. Dan di daerah konsep ini menjadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang meliputi wilayah administratif yang biasanya digunakan istilah pendapatan regional” (Jhingan : 2008, 59).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk yang bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini bisa didapat dari peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional (PDB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan Pendapatan Nasional (PN) (Jhingan : 2008, 60).

5. Pendapatan Asli Daerah

Dalam menunjang usaha pemerataan pembangunan dan agar tercapai pertumbuhan ekonomi maka pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya antara lain melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suparmoko : 2000, 35).

Kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah di setiap Provinsi, Kabupaten, dan kota relatif tidak banyak berubah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari (Suparmoko : 2000, 36-40).

5.1. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah yaitu iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).

- 2) Sebagai alat untuk mengatur (*regulatory*) alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah.

Adapun syarat-syarat menetapkan pajak baru antara lain:

- 1) Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, artinya dapat dipaksakan dan balas jasanya tidak dapat langsung ditunjuk.
- 2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 3) Potensi pajak tersebut memadai, artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan pajaknya.
- 4) Pajak tersebut tidak berdampak ekonomi negatif, artinya tidak menyebabkan adanya alokasi faktor yang salah dan menghambat pembangunan.
- 5) Pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan membayar si wajib pajak.
- 6) Pajak yang dikenakan akan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa (Halim : 2001, 76-78).

a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5.2 Retribusi Daerah

“Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan jasa-jasa negara” (Soemitro : 1998, 90)

“Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balk dari pemerintah, tidak dikenakan iuran” (Soemitro : 1998, 90).

Dari pengertian tersebut yang tidak termasuk pengertian retribusi, walaupun memiliki unsur “pembayaran” adalah pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyeleggara perusahaan atau usaha yang dapat dianggap sebagai perusahaan atau lain-lain usaha daerah yang sah.

Unsur-unsur yang harus ada dalam retribusi adalah (Soemitro : 1998, 91) :

- 1) Pungutan, pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 2) Pembayaran, pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan atas pemanfaatan jasa pemerintah daerah yang diperlukan atau digunakan
- 3) Jasa, jasa yang diberikaan oleh pemerintah daerah, seperti dalam bentuk pelayanan dan penyediaan fasilitas yang digunakan.

Pokok utama pemungutan retribusi daerah adalah jasa yang nyata dari daerah, sehingga daerah harus mulai dengan memberikan jasa, agar memiliki legitimasi dalam pelaksanaan pemungutan terhadap retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk belanja anggaran daerah yang disetor ke kas daerah. Pemerintah telah membentuk beberapa perusahaan.

5.3 Lain-Lain Usaha Daerah Yang Sah

Lain-lain usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha daerah perangkat pemerintah daerah. Hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah seperti penerimaan dinas-dinas daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Lalu Lintas Dan Jalan Raya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah, pemungutan/pembayarannya menjadi beban wajib pajak/retribusi atau pribadi/badan maka dalam pelaksanaan pemungutannya dikatakan oleh Adam Smith yang dikutip Todaro (2006: 170-180) sebagai berikut:

- 1) Asas Equality, artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

- 2) Asas *Certainy*, pajak hendaknya jelas, tegas, dan pasti bagi wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
- 3) Asas *convenience of payment*, pajak jangan sampai terlalu menekan wajib pajak tetapi dengan sesuka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- 4) Asas *efficiency*, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut atau pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan kondisi subyek dan obyek pajak serta pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah.

2 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Prakosa (2004), Syukriy & Halim (2003) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hyphotesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung

pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Syukriy dan Halim (2003 : 51) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* Pendapatan Asli Daerah ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan Dewan Perwakilan Rakyat mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan preferensi publik.

Beberapa hasil penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja langsung.

C. Ekonomi Regional

Teori ekonomi menjelaskan atau mendefinisikan investasi sebagai "Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan". Artinya dengan penambahan investasi maka dapat meningkatkan *output* barang dan jasa dengan lebih efektif dan efisien karena investasi digunakan untuk membeli teknologi yang canggih (Boediono : 2002:86).

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik (Boediono : 2002:89).

Dornbusch & Fischer dalam Thahir (2002 : 145) berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang.

Kesimpulan dari pendapat Boediono dan Dornburch & Fisher dapat diartikan bahwa investasi merupakan penambahan modal bagi kegiatan produksi yang bertujuan untuk membeli suatu teknologi atau alat yang akan memudahkan kegiatan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa.

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi (Dornbusch & Fischer : 2002, 146)

Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah (Jhingan : 2008, 23).

1. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia.
2. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya.
3. Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari (Jhingan : 2008, 24).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno : 2000, 90).

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi (Sukirno : 2000, 91) :

- (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
- (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000:94) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut :

- (1) Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
- (2) Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
- (3) Rendahnya investasi netto.

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan (Suryana : 2000, 95).

Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/perbelanjaan yang berikut (Suryana : 2000, 96):

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang sudah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai apresiasi maka akan didapat investasi neto (Suryana : 2000, 96).

a. Investasi Dalam Bentuk Barang Modal dan Bangunan

Yang tercakup dalam investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan produksi, bangunan/gedung yang baru. Karena daya tahan modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap (*fixed investment*) (Suryana : 2000, 100).

Di Indonesia, istilah yang setara dengan *fixed investment* adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Supaya lebih akurat, jumlah investasi yang perlu diperhatikan adalah investasi bersih yaitu PMTDB dikurangi penyusutan (Suryana : 2000, 100).

b. Investasi Persediaan

Setiap perusahaan umumnya seringkali memproduksi barang lebih banyak daripada target penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tentu saja investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan/keuntungan. Persediaan barang tersebut dikatakan sebagai investasi yang direncanakan atau investasi yang diinginkan karena telah direncanakan. Selain barang jadi, investasi dapat juga dilakukan dalam bentuk persediaan barang baku dan setengah jadi (Suryana : 2000, 102).

1. Hubungan Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah

Paul Samuelson yang oleh Robert H. Nelson penulis buku *Economics as Religion* (Penn State, 2001) disebut sebagai seorang yang

berhasil, dalam buku teks *Introductory Economics* menyederhanakan kehidupan ekonomi setiap masyarakat seperti gambaran berikut (Mubyarto, 1994 : 58):

“Pendapatan nasional menurut Samuelson naik dan turun karena perubahan investasi yang pada gilirannya tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya.”

Menurut pandangan ini, maka pendapatan nasional – dalam skala regional disebut dengan Pendapatan Daerah – akan mengalami peningkatan ketika terjadi rangsangan investasi. Demikian pula sebaliknya, pendapatan nasional – dan juga PAD – akan mengalami kemerosotan ketika investasi turun.

6. Tenaga Kerja

Mankiw (2000:42) menyatakan tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Wikipedia Indonesia menyatakan Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Menurut Badan Pusat Statistik Tenaga Kerja adalah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara

tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.

Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja dalam pasar ini adalah para pencari kerja (Pemilik Tenaga Kerja), sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang / lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja (Mankiw : 2000, 44).

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pemberi tenaga kerja maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah (Mankiw : 2000, 44).

1. Pengaruh Tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan nasional berlangsung secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas

struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik (Todaro, 2004:47).

Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan - kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/ meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan di dalam negeri meningkat, dan seterusnya, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi seperti yang diuraikan di bawah ini (Todaro, 2004:47).

$$Y = F(K, L) \dots\dots\dots (2.8)$$

Fungsi produksi ini menunjukkan bahwa output nasional adalah merupakan fungsi dari input-input yang digunakan dalam proses produksi, yang dalam hal ini di asumsikan terdiri dari faktor modal (K) dan faktor tenaga kerja (L). Fungsi ini mengandung pengertian bahwa produktivitas marginal (*marginal productivity*) setiap faktor produksi bersifat menurun dalam situasi proses produksi yang bersifat *constant return to scale* (Todaro, 2004:47).

7. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu alat yang sering dipakai dalam mengukur kegiatan ekonomi secara keseluruhan adalah Produk nasional. keperluan keperluan analisis biasanya menggunakan konsep PDRB yaitu berupa barang-barang dan jasa-jasa yang belum dikoreksi dengan pendapatan bersih terhadap luar negeri dari faktor produksi dan untuk di daerah, konsep PDRB ini menjadi PDB yang meliputi wilayah administrasi yang biasa menggunakan istilah pendapatan regional (Sukirno : 2000, 27).

Pada hakekatnya bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional secara produksi sering dikenal produk nasional. Nilai pendapatan nasional meliputi nilai jasa-jasa dan barang-barang yang diproduksi oleh semua faktor produksi, tanpa memandang apabila faktor produksi itu dimiliki setiap warga Negara asing atau warga Negara itu sendiri yang terdapat didalam negeri. Pendapatan yang diperoleh disebut Produk Domestik Bruto (Sukirno : 2000, 28).

Sukirno (2000 : 29) mengemukakan kata domestik dimaksudkan untuk menekan bahwa nilai pendapatan nasional yang diperoleh menggambarkan nilai seluruh pendapatan nasional yang diperoleh dari seluruh nilai produksi yang tercipta di dalam negeri, tanpa membedakan apakah produksi itu diciptakan oleh faktor produksi yang berasal dari negara itu sendiri ataupun faktor produksi dari negara lain yang digunakan oleh negara itu, produksi mereka termasuk ke dalam pendapatan nasional regional.

PDRB juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Alasan yang mendasar pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah adalah :

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah, PDRB dihitung atas dasar konsep aliran artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu (Sukirno : 2000, 30).

Tiga cara pendekatan yang digunakan untuk menghitung Produk Regional Bruto (PDRB), yaitu :

1. Dari sisi pendapatannya disebut pendapatan regional, merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) diterima oleh faktor-faktor berupa gaji dan upah, surplus udaha, penyusutan, dan pajak tak langsung netto yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Dari sisi produksi disebut Produk regional, merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. Dari segi pengeluaran disebut Pengeluaran regional, merupakan jumlah dari pengeluaran konsumsi atau permintaan akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah, pembentukan tetap domestic bruto, lembaga swasta nirlaba, perusahaan stok dan ekspor netto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (Sukirno 2002 : 59)

Ada dua cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

(Sukirno 2002 : 64-66) :

1. Metode perhitungan PDRB atas harga berlaku dihitung melalui tiga pendekatan yaitu :

- (1) Pendekatan produksi, digunakan untuk menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi daerah dengan cara mengurangkan biaya-biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor maupun sub sektor.

- (2) Pendekatan Pendapatan, dimana nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas faktor produksi yaitu gaji dan upah, penyusutan, surplus usaha dan pajak tidak langsung netto.
- (3) Pendekatan pengeluaran, yang bertitik tolak pada penggunaan dari barang dan jasa, ini digunakan dalam menghitung sektor Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor bangunan di daerah.

2. Metode perhitungan PDRB atas harga konstan yang dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- (1) Metode evaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun harga pada tahun dasar.
- (2) Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara menghilangkan nilai tambah pada tahun yang dihitung dengan indeks produksi.
- (3) Metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai tambah atas harga dasar yang berlaku masing-masing tahun indeks harga.

Ada beberapa teori yang mendukung faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan PDRB (Mardiasmo : 2002, 56-59) :

1. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Harrod (1948) di Inggris dan Domar (1957) di Amerika Serikat. Di antaranya menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod Domar didasarkan pada asumsi :

- 1. Perekonomian bersifat tertutup
- 2. Hasrat menabung ($MPS=0.5$) adalah konstan
- 3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*)
- 4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud disini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*capital output ratio/COR*) tetap. Perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$G = K = N$$

Dimana :

G = *Growth* (tingkat pertumbuhan output)

K = *Capital* (tingkat pertumbuhan modal)

N = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo Klasik dikembangkan oleh Solow (1970) dan Swan (1956). Model Solow – Swan menggunakan unsur

pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi (Mardiasmo : 2002, 61).

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara Kapital (K) dan tenaga Kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal output dan rasio modal tenaga kerja (Mardiasmo : 2002, 61).

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal, mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas kapital meningkat (Mardiasmo : 2002, 62).

Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Teori Neo Klasik sebagai penerus dari teori Klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh

maksimal sama seperti dalam ekonomi model klasik. Kebijakan yang perlu ditempuh adalah menghilangkan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus, barang, modal, tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Hal khusus yang perlu dicatat adalah bahwa model Neo Klasik mengasumsikan $I = S$. Hal ini berarti kebiasaan masyarakat yang suka memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Analisa lanjutan dari paham Neo Klasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*) diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha di investasikan kembali (Mardiasmo : 2002, 63).

Pertumbuhan ekonomi akan menjamin tersedianya kebutuhan dasar seperti perumahan, papan dan sandang bagi sebagian besar penduduk, semua masyarakat akan merubah pola konsumsinya karena adanya perubahan penghasilan, sehingga menyebabkan produsen akan banyak menghasilkan produk dan pemerintah akan membangun berbagai fasilitas untuk kepentingan industri dan kepentingan industri dan kepentingan umum (Mardiasmo : 2002, 63).

3. Teori Keynes

Ekonomi Keynesian adalah nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara

tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya Great Depression (<http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm>).

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh (Hudiyanto : 2001, 67).

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan

melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat (Hudiyanto : 2001, 68).

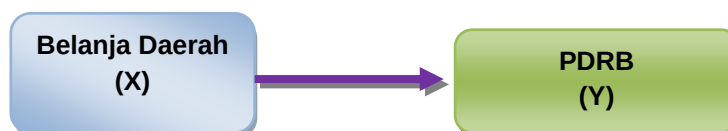
Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu *laissez faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Hudiyanto : 2001, 69).

Teori Keynes mengecam kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga

mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “PERANAN PEMERINTAH” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest And Money*” (Hudiyanto : 2001, 70).

E. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, dapat dibuat kerangka konsep dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Belanja daerah merupakan variabel independen yang mempengaruhi PDRB. Artinya belanja daerah berpengaruh langsung terhadap PDRB. Selanjutnya belanja daerah juga berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja daerah juga berpengaruh terhadap PAD melalui pengaruh PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai kegiatan perekonomian suatu daerah berupa barang dan jasa yang dihasilkan dalam setahun atau periode tertentu. Semakin tinggi kegiatan barang dan jasa yang dihasilkan maka akan semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto.

Belanja pembangunan atau belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan. Diharapkan dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk sektor pembangunan dapat meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto. Tentunya agar pengeluaran pemerintah dapat efektif dan efisien perlu adanya bantuan dana yaitu investasi. Investasi bisa diperoleh dari pihak negeri ataupun swasta atau yang lebih dikenal dengan PMDN dan PMA. Tentunya pihak investor berharap dengan menanamkan investasi pada suatu daerah tingkat *return of investment* cepat terjadi.

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka konsep dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

2. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini terdiri dari elemen-elemen yang merujuk pada bentuk penelitian *non contrived*. Di sini peneliti hanya mengumpulkan data tanpa memberikan perlakuan apapun terhadap data tersebut dengan maksud dan tujuan pencarian solusi dari masalah yang telah dirumuskan, sehingga beberapa hipotesis yang telah dikonstruksi dapat diuji secara empirik.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian survei ini memfokuskan pada pengungkapan hubungan kausal antar variabel secara langsung dan tidak langsung, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian atau penjelasan yang lebih khusus terhadap variabel yang diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja Daerah (X) adalah pengeluaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang dimaksud adalah

belanja pembangunan. Satuan hitung Belanja Daerah adalah Rupiah (Rp).

2. Produk Domestik Regional Bruto (Y) adalah Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di Kalimantan Utara. Dalam penelitian ini Produk Domestik Regional Bruto yang dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku karena Produk Domestik Regional Bruto tersebut dipengaruhi oleh inflasi, sehingga dapat diketahui fluktuasi PDRB, satuan hitung PDRB adalah Rupiah (Rp).

C. Rincian Data Yang di Perlukan

Data merupakan komponen yang penting dalam penelitian ini, karena akan digunakan untuk melakukan perhitungan. Adapun rincian data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Gambaran umum wilayah Kalimantan Utara.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk wilayah Kalimantan Utara.
3. Data Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kalimantan Utara.
4. Data Tenaga kerja yang terserap dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kalimantan Utara.

5. Data Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kalimantan Utara.
6. Data Belanja pembangunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kalimantan Utara.
7. Data lainnya yang menunjang penelitian ini.

D. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini meliputi variabel Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh teori-teori yang mendukung penelitian dan diambil dari literatur maupun buku-buku, artikel ilmiah serta penelitian sebelumnya.

F. Analisis Data

Analisis data atau perhitungan statistik dalam penelitian ini didasarkan atas kerangka konsep, rumusan masalah serta hipotesis. Adapun perhitungan statistik yang dipergunakan adalah Regresi Sederhana. Dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e \dots\dots\dots(\text{Sugiono, 2005 : 218})$$

Dimana dalam penelitian :

Y = Produk Domestik Regional Bruto

X = Belanja Daerah

e = *Error term* atau nilai residual

Tingkat kepercayaan (*Level of confident*)

Tingkat signifikan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah 5 % atau 0,05, artinya peneliti percaya terhadap model penelitian sebesar 95 %.

Teknik Pengujian

Uji F (Uji simultan / secara bersama-sama)

Pengujian koefisien secara bersama-sama (uji simultan) digunakan pengujian hipotesis uji F pada tingkat kepercayaan 95 %. Adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut :

$$F_h = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots\dots\dots(\text{Sugiono, 2005 : 223})$$

Dari rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Banyaknya variabel

1 = Bilangan konstan

n = banyaknya sampel

Uji F-statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama. Untuk pengujian Uji F, dalam penelitian ini dilihat melalui probabilitas/signifikansi Sugiono (2012:80) ketentuannya adalah sebagai berikut:

Ketentuan (berdasarkan probabilitas/signifikansi) :

H_0 : ditolak, jika probabilitas $F < \alpha 0,05$

H_0 : diterima, jika probabilitas $F > \alpha 0,05$

Uji t-statistik

Uji-t digunakan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis benar.

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat.

Untuk pengujian uji t, dalam penelitian ini dilihat melalui probabilitas/signifikan $\alpha =$ Sugiono (2012:93) sebagai berikut :

Ketentuan (berdasarkan probabilitas/signifikansi) :

H_0 : ditolak, jika probabilitas $t < \alpha 0,05$

H_0 : diterima, jika probabilitas $t > \alpha 0,05$

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

Untuk dapat menganalisis pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, maka terlebih dahulu data-data yang sudah diperoleh pada bab sebelumnya ditabulasikan, Data penelitian yang akan diinput ke dalam proses perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Belanja Daerah, PDRB

Tahun	BELANJA DAERAH (X)	PDRB (Y)
2018	5.918.568.270	110.953.452
2019	8.142.835.450	115.475.684
2020	11.339.765.190	120.067.296
2021	14.559.749.920	121.990.486

B. Analisis

1. Hasil Persamaan I

Model persamaan 1 bertujuan menganalisis pengaruh langsung Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Hasil Persamaan I

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.733E13	4.127E12		13.891	.000
	Belanja Daerah	839.104	225.389	.297	3.723	.010

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Lampiran 1

Tabel. 5.2 menghasilkan persamaan adalah sebagai berikut :

$$Y_{1t} = P_1 X_{1t} + e_t$$

$$= 0,297X_1 + e_t$$

Di mana :

Y adalah Produk Domestik Regional Bruto

X₁ Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Y₁ Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai koefisien sebesar 0.297.

2. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R²)

untuk persamaan I adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Uji Goodness of Fit

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.992	.987	1.240E12

a. Predictors: (Constant), Penduduk Bekerja, Total (PMA + PMDN), Belanja Daerah

Sumber : Lampiran 1

Koefisien korelasi sebesar $R = 0.996$ angka ini menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi sangat kuat dari variabel belanja daerah (X_1), investasi (X_2), tenaga kerja (X_3) terhadap PDRB (Y_1).

Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah *adjusted R square* yaitu 0,987. Artinya variabel independen untuk model persamaan I memberikan pengaruh terhadap PDRB sebesar 98,7 % dan sisanya 1,2 % dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Uji F

Pengujian hipotesis uji F atau *Fisher Test* pada tingkat kepercayaan 95 % dan tingkat kesalahan sebesar $\alpha = 0,05$ dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.081E27	3	3.603E26	234.527	.000 ^a
	Residual	9.218E24	6	1.536E24		
	Total	1.090E27	9			

a. Predictors: (Constant), Penduduk Bekerja, Total (PMA + PMDN), Belanja Daerah

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Lampiran 1

Tingkat Signifikan sebesar 0,00 dengan syarat jika tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan.

Hasil perhitungan uji F (dalam tabel ANOVA^b) diperoleh nilai Sig = 0,000. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai Tingkat Sig lebih kecil 0,05

($0,000 < 0,05$), artinya dari pengujian secara bersama-sama yaitu variabel belanja daerah (X_1), investasi (X_2), tenaga kerja (X_3) memberikan pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara.

4. Uji t

Uji t untuk menguji koefisien b_1 , b_2 , b_3 , terhadap Y dengan tingkat kepercayaan (*level of confident*) 5 % dan tingkat kesalahan 5% (0,05).

Dapat dilihat pada tabel 5.2, hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah (X_1)

Hasil perhitungan diperoleh nilai Sig = 0,010 Jadi berdasarkan perhitungan tersebut nilai Tingkat Sig lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$), artinya belanja daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara.

C. Pembahasan

1 Pengaruh secara langsung Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Belanja Daerah terhadap PDRB. Untuk menguji signifikansi masing-masing variabel secara individu dilakukan Uji t-statistik. Variabel Belanja Daerah i berpengaruh signifikan terhadap PDRB, karena tingkat (sig < 0,05) yaitu ($0,010 < 0,05$). Belanja daerah berpengaruh langsung terhadap PDRB. Artinya semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan ekonomi

maka diasumsikan nilai PDRB secara keseluruhan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara meningkat.

Penelitian Afrizal (2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian di dapat hasil belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya setiap kenaikan belanja pemerintah maka nilai PDRB akan menurun.

Anasmen (2009) dengan judul Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. Tahun penelitian adalah tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Mangkoesoebroto dalam Aziz (2003 : 35) menyatakan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) semakin besar nilai yang dialokasikan maka semakin banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat terlaksana. Contoh : pembangunan tempat bermain, infrastruktur. Apabila pembangunan ini terlaksana dengan baik maka diasumsikan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat atau tercapai

targetnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diukur berdasarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori hubungan belanja daerah terhadap PDRB dapat dibuat rumus $Y = C + I + G$.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lebih memperhatikan pengeluaran atau belanja daerah yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan diharapkan dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat.